



**PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, DEWAN KOMISARIS
INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

STEVANY LOURENTIA BR BANGUN

1925100471

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

2021



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : STEVANY LOURENTIA BR BANGUN
NPM : 1925100471
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, DEWAN
KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT
TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

MEDAN, NOVEMBER 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Rahima Br Purba, S.E., M.Si, Ak., C.A)



(Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)

PEMBIMBING I

(Dr. Rahima Br Purba, S.E., M.Si, Ak., C.A)

PEMBIMBING II

(Doni Efrizah, S.S., M.S.)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : STEVANY LOURENTIA BR BANGUN
NPM : 1925100471
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, DEWAN
KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT
TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

MEDAN, NOVEMBER 2021

KETUA

(Hasrul Azwar Hasibuan, S.E., M.Si., Ak., C.A.)

ANGGOTA - I

(Dr. Rahima Pr Purba, S.E., M.Si, Ak., C.A.)

ANGGOTA - II

(Doni Efrizah, S.S., M.S.)

ANGGOTA - III

(Nina Andriany Nasution., S.E., Ak., M.Si.)

ANGGOTA-IV

(Dra. Mariyam, Ak., M.Si., C.A.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : STEVANY LOURENTIA BR BANGUN
NPM : 1925100471
Fakultas/program studi : SOSIAL SAINS / AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, November 2021



(Stevany Lourentia Br Bangun)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Stevany Lourentia Br Bangun
NPM : 1925100471
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Matai

Medan, November 2021

Yang membuat pernyataan



(Stevany Lourentia Br Bangun)



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

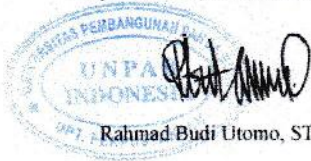
SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 295/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
saudara/i:

: STEVANY LOURENTIA BR BANGUN
: 1925100471
at/Semester : Akhir
as : SOSIAL SAINS
an/Prodi : Akuntansi

asannya terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
us tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 05 Agustus 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01
wisi : 01
Efektif : 04 Juni 2015



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : STEVANY LOURENTIA BR BANGUN
NPM : 1925100471
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.
Judul Skripsi : PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI , DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
21 April 2021	ACC Sempro	Disetujui	
28 Juli 2021	ACC Sidang	Disetujui	
03 Agustus 2021	ACC Sidang	Disetujui	
12 November 2021	acc jilid lux	Disetujui	

Medan, 16 November 2021
Dosen Pembimbing,



Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : STEVANY LOURENTIA BR BANGUN
NPM : 1925100471
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Doni Efrizah, SS., MS
Judul Skripsi : PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI , DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
05 Juni 2021	Acc seminar proposal	Disetujui	
03 Agustus 2021	Acc sidang meja hijau	Disetujui	

Medan, 16 November 2021
Dosen Pembimbing,



Doni Efrizah, SS., MS

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagi pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Fahri Mubarram Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: STEVANY LOURENTIA BR BANGUN
Tempat/Tgl. Lahir	: JAKARTA / 08 Desember 1997
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1925100471
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Bisnis
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 110 SKS, IPK 3.73
Nomor Hp	: 082167621162

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu

Rektor I,

 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 20 Oktober 2020

Pemohon,

(Stevany Laurentia Br Bangun)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr. Rahima Br. Purba, SE, M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

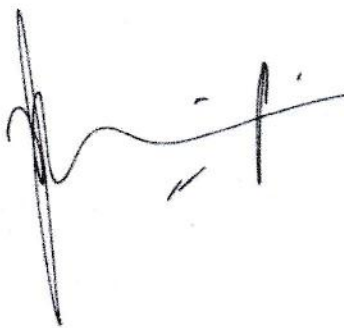
 (Dr. Rahima Br. Purba, SE, M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Doni Efrizah, SS., MS.)

Acc jilid Lux

12-11-2021



**PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, DEWAN KOMISARIS
INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE
PADA PERUSAHAAN MANUFaktur
SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

STEVANY LOURENTIA BR BANGUN

1925100471

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



Acc jilid lux
13/12/2021

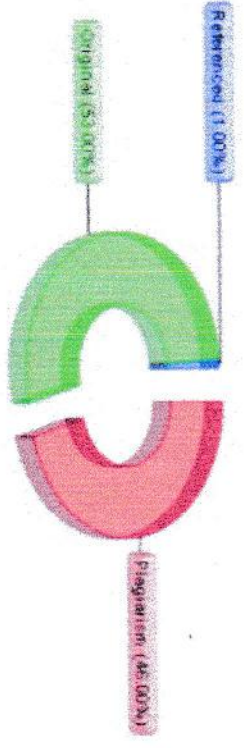
Analysed document: **STEVANY LOURENTIA BR BANGUN_1925100471_Akuntansi.docx** Licensed to Universitas Pembangunan Panca Budi_Licensed03

- 1 Comparison Present Rewrite
- 2 Check type Internet Check



Detailed document body analysis

- 1 Relation chart



- 2 Distribution graphs



- 3 Top sources of plagiarism 46

123% 15715 | <http://www.upb.ac.id> | <http://www.upb.ac.id>

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 16 November 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : STEVANY LOURENTIA BR BANGUN
 Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta / 08 Desember 1997
 Nama Orang Tua : MARKEN BANGUN
 N. P. M : 1925100471
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 082167621162
 Alamat : BATUKARANG, KEL. BATU KARANG, KEC. PAYUNG, KAB. KARO

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PENGARUH KONSERVATISME AKUNT. DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFATUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan index prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkrip sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (buku dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani oleh pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

L

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



STEVANY LOURENTIA BR BANGUN
 1925100471

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

Analisis penelitian untuk membuktikan apakah konservatisme akuntansi, dewan komisaris independen dan komite audit secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah laporan tahunan dari masing-masing perusahaan, yang dipublikasikan melalui website www.idnfinancials.com. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *puposive sampling* dengan total sampel sebanyak 9 perusahaan dan data dari tahun 2015 – 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana $t_{hitung} (4,165) > t_{tabel} (2,019)$ dan signifikan $0,040 < 0,05$. Dewan komisaris independen akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana $t_{hitung} (5,187) > t_{tabel} (2,019)$ dan signifikan $0,033 < 0,05$. Komite Audit akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana $t_{hitung} (6,223) > t_{tabel} (2,019)$ dan signifikan $0,028 < 0,05$. Konservatisme akuntansi, dewan komisaris independen dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana $F_{hitung} 5,559 > F_{tabel} 2,83$, dan signifikan $0,045 < 0,05$.

Kata Kunci : Konservatisme Akuntansi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Tax Avoidance

ABSTRACT

The research analysis is to prove whether accounting conservatism, independent board of commissioners and audit committee partially and simultaneously affect tax avoidance in Food and Beverage Sub-Sector Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. The data used is the annual report of each company, which is published through the website www.idnfinancials.com. The analytical method used in this study is the associative method. The sampling method used is purposive sampling with a total sample of 9 companies and data from 2015 – 2019. The results of this study indicate that accounting conservatism partially has a significant effect on tax avoidance in Food and Beverage Sub-Sector Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange, where $t_{count} (4.165) > t_{table} (2.019)$ and significant $0.040 < 0.05$. The independent accounting board of commissioners partially has a significant effect on tax avoidance in the Food and Beverage Sub-Sector Manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange, where $t_{count} (5.187) > t_{table} (2.019)$ and significant $0.033 < 0.05$. The accounting audit committee partially has a significant effect on tax avoidance in the Food and Beverage Sub-Sector Manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange, where $t_{count} (6.223) > t_{table} (2.019)$ and significant $0.028 < 0.05$. Accounting conservatism, independent commissioners and audit committees simultaneously have a significant effect on tax avoidance in Food and Beverage Sub-Sector Manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange, where $F_{count} 5.559 > F_{table} 2.83$, and significant $0.045 < 0.05$.

Keywords : *Accounting Conservatism, Independent Board of Commissioners, Audit Committee And Tax Avoidance*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih setia dan anugerah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan pembuatan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Universitas Pembangunan Panca Budi. Proposal ini berjudul **“Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Rahima Br Purba, S.E., M.Si, Ak., C.A., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Dr. Rahima Br Purba, S.E., M.Si, Ak., C.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Doni Efrizah., S.S., M.S., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.

6. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.
7. Kepada teman-temanku terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih.

Medan, November 2021
Penulis

Stevany Lourentia Br Bangun
1925100471

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 <i>Agency Theory</i> / Teori Keagenan	10
2.1.2 Konservatisme Akuntansi.....	12
2.1.3 Komisaris Independen	21
2.1.4 Komite Audit	23
2.1.5 Tax Avoidance.....	25
2.2 Penelitian Sebelumnya	26
2.3 Kerangka Konseptual	27
2.4 Hipotesis.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	34
3.4 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.1 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	43
4.1.1 Gambaran Tentang Perusahaan.....	43
4.1.2 Statistik Deskriptif	53

4.1.3	Pengujian Asumsi Klasik.....	54
4.1.4	Regresi Linier Berganda	58
4.1.5	Uji Hipotesis	59
4.2	Pembahasan.....	62
4.2.1	Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance	62
4.2.2	Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance	63
4.2.3	Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance	63
4.2.4	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance	64
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	66
5.2	Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya.....	26
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	33
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	34
Tabel 3.3 Populasi dan Sampel Perusahaan.....	36
Tabel 4.1 <i>Descriptive Statistics</i>	53
Tabel 4.2 Uji Normalitas <i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>	56
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas	57
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi	58
Tabel 4.5 Regresi Linier Berganda	58
Tabel 4.6 Uji Simultan	59
Tabel 4.7 Uji Parsial.....	60
Tabel 4.8 Uji Determinasi	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	31
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas	54
Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang. Oleh karena itu, demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, tentunya pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk melakukan pembangunan di seluruh sektor agar kesejahteraan nasional dapat tercapai. Akan tetapi, dalam melakukan pembangunan nasional diperlukan dana yang tidak sedikit. Terdapat dua sumber dana dalam melaksanakan pembangunan nasional, yaitu sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan sumber pendanaan yang berasal dari non pajak. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tingginya penerimaan sektor pajak membuat pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan demi mengoptimalkan penerimaan pajak antara lain dengan membuat aturan baru mengenai perpajakan maupun merevisi undang-undang perpajakan. Namun, upaya pemerintah dalam rangka memperoleh penerimaan sektor pajak yang optimal mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala yang muncul adalah adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah yang menarik pajak. Pajak merupakan beban

yang akan mengurangi laba dari perusahaan, hal ini bertolak belakang dengan tujuan entitas bisnis yang ingin mempunyai laba yang besar. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak agar kesejahteraan masyarakat terpenuhi, sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak mengurangi pembayaran pajak karena pajak dianggap sebagai pengurang pendapatan.

Salah satu cara perusahaan untuk mengurangi beban pajak adalah dengan melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah usaha mengurangi pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada. Dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Dalam penelitiannya dijelaskan pula bahwa praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisir kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi laba pajaknya.

Anggaran yang tidak terpenuhi perusahaan dapat disebabkan oleh praktik-praktik penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menekan nilai pajak terutang dari perusahaan (Darmawati & Delfina, 2018). Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan didasari dari perolehan laba perusahaan itu sendiri. Hal ini menjadi sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan. Perusahaan melakukan penghindaran pajak karena pemegang saham ingin pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan. Tidak adanya aturan yang dilanggar membuat pemerintah tidak

melarang tindakan ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan ini menyebabkan turunnya penerimaan negara. Pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak dapat berbuat apa-apa dalam melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak sebenarnya merupakan dilema bagi pemerintah, karena Wajib Pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan, namun dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu konservatisme akuntansi, dewan komisaris independen dan komite audit.

Brigham (2015:94), menyatakan konservatisme Akuntansi adalah suatu prinsip pengecualian atau modifikasi dalam arti bahwa prinsip tersebut bertindak sebagai batasan terhadap penyajian data akuntansi yang relevan dan andal. Prinsip konservatisme akuntansi digunakan bukan sebagai alasan untuk mengurangi besar pajak yang dibayarkan wajib pajak atau perusahaan akan tetapi prinsip konservatisme merupakan tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan yang mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba.

Brigham (2015:34), menyatakan dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang kedudukannya sama dengan anggota dewan komisaris lainnya, yakni sebagai badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat, sehingga penghindaran pajak dapat ditekan. Rata-rata jumlah komite audit pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sebanyak 5 dewan komisaris independen sedangkan pada tahun 2019 menurun sebesar 4 dewan komisaris independen.

Husnan (2015:72), menyatakan komite audit adalah salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Perusahaan yang memiliki komite audit yang melakukan tugasnya dengan baik akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan selalu mengawasi segala kegiatan di dalam perusahaan, sehingga akan meminimalisir tindakan *tax avoidance*. Rata-rata jumlah komite audit pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sebanyak 3 komite sedangkan pada tahun 2019 menurun sebesar 2 komite.

Terdapat fenomena yang terjadi yaitu perusahaan menganggap bahwa perusahaan menganggap pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak secara legal maupun illegal. Banyaknya perusahaan yang merugikan negara karena melakukan penghindaran pajak sehingga penerimaan pajak bagi negara berkurang. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin mengganggu pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan manipulasi laba agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak. Perusahaan memanfaatkan kelemahan ketentuan pajak sehingga melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan transaksi yang tidak dibebankan kedalam beban pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang akan dibahas penulis adalah:

1. Terjadi penurunan rata-rata jumlah dewan komisaris pada tahun 2018 sebanyak 5 dewan komisaris independen sedangkan pada tahun 2019 menurun sebesar 4 dewan komisaris independen.
2. Terjadi penurunan rata-rata jumlah komite audit pada tahun 2018 sebanyak 3 komite sedangkan pada tahun 2019 menurun sebesar 2 komite.
3. Perusahaan menganggap pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan.
4. Perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak secara legal maupun illegal.
5. Banyaknya perusahaan yang merugikan negara karena melakukan penghindaran pajak sehingga penerimaan pajak bagi negara berkurang.
6. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin mengganggu pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan manipulasi laba agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.

7. Perusahaan memanfaatkan kelemahan ketetapan pajak sehingga melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan transaksi yang tidak dibebankan kedalam beban pajak.

1.2.2 Batasan Masalah

Mengingat masalah yang akan dihadapi maka agar penelitian ini lebih terarah dan pembahasannya tidak menyimpang maka penulis membatasi pembahasan pada pengaruh konservatisme akuntansi, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, dalam kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2019.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

4. Apakah konservatisme akuntansi, dewan komisaris independen dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah konservatisme akuntansi, dewan komisaris independen dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Menilai dan memahami *tax avoidance* yang terjadi dan juga sebagai rekomendasi untuk melakukan perbaikan mengenai pengaruh konservatisme akuntansi, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi investor dalam memutuskan untuk melakukan investasi.

3. Bagi Peneliti

Mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan, mengembangkan pengetahuan dan wawasan peneliti sehubungan dengan pengaruh konservatisme akuntansi, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

4. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi, informasi, dan bahan acuan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama dimasa yang akan datang. Penelitian ini juga bermanfaat untuk membuka kemungkinan pengembangan topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat lanjutan, melengkapi, maupun menyempurnakan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Pramudito (2015), dengan judul Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. Jumlah Observasi/data (n): peneliti terdahulu menggunakan sampel sebanyak 112 perusahaan Manufaktur pada tahun 2010 sampai 2013. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 9 perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019.
2. Waktu Penelitian: penelitian terdahulu dilakukan tahun 2015 sedangkan penelitian ini tahun 2021.
3. Lokasi Penelitian: lokasi penelitian terdahulu pada Perusahaan Manufaktur, sedangkan penelitian ini dilakukan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory* / Teori Keagenan

Agency Theory atau teori keagenan menjelaskan adanya kontrak antara agen dan *principal* yang mana agen menerima mandat untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan (Santo, 2017). Teori keagenan memiliki asumsi bahwa setiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Agen diberi kekuasaan oleh *principal* untuk membuat keputusan. Hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan antara agen dan *principal*. Permasalahan semacam ini muncul akibat adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara agen dan *principal*.

Baridwan (2015:59) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rasionality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Hubungan keagenan merupakan kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Jika kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama, maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh

principal. Pertentangan terjadi apabila tidak menjalankan perintah *principal* untuk kepentingannya sendiri.

Pemegang saham di dalam penelitian ini adalah *principal* sedangkan manajemen adalah agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak pemegang saham untuk bekerja dan sesuai kepentingan pemegang saham. Manajemen berkewajiban mempertanggungjawabkan wewenang tersebut dengan membuat laporan keuangan. Agen lebih mengetahui kondisi perusahaan dan informasi tentang *tax avoidance* yang berhubungan dengan laba perusahaan, dimana laba perusahaan merupakan informasi penting yang dapat mempengaruhi *principal* tentang keadaan yang dihadapi perusahaan. Perusahaan yang mengungkapkan laba kecil akan menjadi keuntungan karena memperkecil beban pajak. *Principal* yang mengetahui laba kecil akan menjadikan gambaran bahwa perusahaan kurang sehat di mata investor, karena investor akan melihat bagaimana kesehatan perusahaan salah satunya dengan laba untuk mengetahui besar kecilnya deviden yang diterima. Semakin besar laba perusahaan, maka semakin besar deviden yang akan diterima oleh investor. Permasalahan semacam ini menimbulkan perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara manajer sebagai agen pemegang saham sebagai *principal*. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen menimbulkan adanya konflik keagenan. Konflik keagenan yang terjadi dapat diminimalkan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu konservatisme akuntansi, komisaris independen dan komite audit.

2.1.2 Konservatisme Akuntansi

2.1.2.1 Pengertian Konservatisme Akuntansi

FASB *Statement of Concept* No.2 menyatakan bahwa “konservatisme merupakan reaksi hati-hati menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko intern dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan”. Ketidakpastian risiko harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai prediksi dan kenetralan dapat diperbaiki. Sedangkan konservatisme akuntansi berdasarkan Brealey (2015:56) yaitu: “Implikasi prinsip akuntansi yang mengakui biaya atau rugi yang memungkinkan akan terjadi, tetapi tidak segera mengakui pendapatan atau laba yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar”. Fahmi (2018:45) menyatakan konservatisme akuntansi yaitu : “Jika ragu maka pilihlah solusi yang sangat kecil kemungkinannya akan menghasilkan penetapan yang terlalu tinggi bagi aktiva dan laba”.

Brigham (2015:94), menyatakan konservatisme akuntansi adalah suatu prinsip pengecualian atau modifikasi dalam arti bahwa prinsip tersebut bertindak sebagai batasan terhadap penyajian data akuntansi yang relevan dan andal. Konservatisme menyatakan bahwa akuntan harus melaporkan akuntansi informasi akuntansi yang terendah dari beberapa kemungkinan nilai untuk aktiva dan pendapatan, serta yang tertinggi dari beberapa kemungkinan nilai kewajiban dan beban. Konservatisme biasanya didefinisikan sebagai reaksi kehati-hatian (*prudent*) terhadap ketidakpastian, ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemberi pinjaman (*debtholders*) yang menentukan sebuah verifikasi standar yang lebih tinggi untuk mengakui

goodnews daripada *badnews*. Ketidakpastian dan risiko tersebut harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai prediksi dan kenetralan bisa diperbaiki. Pelaporan yang didasari kehati-hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua pemakai laporan keuangan.

Konservatisme sebagai reaksi kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan resiko inheren dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Selain merupakan konvensi penting dalam laporan keuangan, konservatisme mengimplikasikan kehati-hatian dalam mengakui dan mengukur pendapatan dan aktiva. Konsep konservatisme menyatakan bahwa dalam keadaan yang tidak pasti, manajer perusahaan akan menentukan pilihan perlakuan atau tindakan akuntansi yang didasarkan pada keadaan, harapan, kejadian, atau hasil yang dianggap kurang menguntungkan (Brealey, 2015:59). Konservatisme merupakan antisipasi terhadap kerugian dari pada laba. Brealey (2015:61), menyatakan mengantisipasi laba berarti mencatat laba sebelum ada klaim secara hukum dihubungkan dengan aliran kas dimasa yang akan datang dan sebaliknya tidak mengantisipasi laba berarti belum mencatat laba sebelum ada klaim secara hukum dihubungkan dengan aliran kas dimasa yang akan datang. Menurut Brealey (2015:65) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi meliputi penggunaan standar yang lebih tepat untuk mengakui *bad news* sebagai kerugian dan untuk mengakui *good news* sebagai keuntungan dan memfasilitasi kontrak yang efisien antara manajer dan *shareholders*.

Brigham (2015:97), menyatakan konservatisme akuntansi secara tradisional didefinisi sebagai antisipasi terhadap semua rugi tetapi tidak

mengantisipasi laba. Pengantisipasi rugi berarti pengakuan rugi sebelum suatu verifikasi secara hukum dapat dilakukan, dan hal yang sebaliknya dilakukan terhadap laba. Konservatisme akuntansi merupakan asimetri dalam permintaan verifikasi terhadap laba dan rugi. Interpretasi tersebut berarti bahwa semakin besar perbedaan tingkat verifikasi yang diminta terhadap laba dibandingkan terhadap rugi, maka semakin tinggi tingkat konservatisme akuntansi.

2.1.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konservatisme

Pengaruh konservatisme akuntansi dapat diukur melalui banyak faktor diantaranya ukuran perusahaan, risiko perusahaan, intensitas modal, pajak, risiko litigasi, *debt covenant*, komite audit, kepemilikan manajerial. Menurut Brigham (2015:99), diterapkannya prinsip konservatisme dalam pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengontrakan (*contracting*)

Pengontrakan sebagai pendorong timbulnya praktek konservatisme merupakan sumber yang paling dahulu muncul dan memiliki argumentasi yang telah berkembang secara sempurna. Penjelasan pengontrakan tersebut didasarkan pada praktek akuntansi dan pengawasan manajemen yang telah lama dijalankan.

2. *Litigation*

Lingkungan hukum yang berlaku pada suatu wilayah tertentu mempunyai dampak yang signifikan dalam kebijakan manajer dalam melaporkan kondisi keuangan perusahaannya. Dalam hal ini, manajer akan menyeimbangkan biaya litigasi yang akan timbul dengan manfaat yang diperoleh dari pelaporan keuangan dengan kebijakan akuntansi yang agresif. Sehingga, perusahaan yang

beroperasi pada wilayah dengan lingkungan hukum yang ketat akan cenderung menerapkan kebijakan akuntansi yang konservatif.

3. *Political Cost*

Biaya politis muncul akibat konflik kepentingan antara manajer dengan pemerintah sebagai pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk mengalihkan kekayaan perusahaan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Manajer memiliki kecenderungan untuk mengurangi nilai laporan laba untuk menghindari biaya politik yang besar.

2.1.2.3 Manfaat Konservatisme Akuntansi

Prinsip konservatisme dianggap dapat bermanfaat karena dapat digunakan untuk memprediksikan laba dan kondisi keuangan perusahaan pada masa yang akan datang, karena dengan menggunakan prinsip konservatisme, perusahaan akan menjadi lebih berhati-hati dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa mendatang. Brigham (2015:101), menyatakan kontroversi mengenai manfaat angka-angka akuntansi yang konservatif belum juga mendapatkan jalan tengahnya.

1. Akuntansi Konservatif Tidak Bermanfaat

Meskipun prinsip konservatisme telah diakui sebagai dasar laporan keuangan di Amerika Serikat, namun beberapa peneliti masih meragukan manfaat konservatisme tersebut. Pendapat ini dipicu oleh pengertian mengenai konservatisme itu sendiri yang disampaikan oleh beberapa peneliti terdahulu, dimana akuntansi yang mengakui kerugian lebih cepat daripada pendapatan dan keuntungan, serta menilai aktiva dengan nilai terendah dan kewajiban dengan nilai tertinggi.

2. Akuntansi Konservatif Bermanfaat

Akuntansi konservatif tetap disarankan untuk digunakan. Hal ini dapat dilihat dalam aturan-aturan yang ada dalam standar akuntansi yang ada di Indonesia (PSAK). Akuntansi konservatif akan menguntungkan dalam kontrak-kontrak antara pihak-pihak dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Konservatisme dapat membatasi tindakan manajer untuk membesar-besarkan laba (manajemen laba) serta memanfaatkan informasi yang asimetri sehingga dapat mengurangi konflik yang terjadi antara manajemen dan para pemegang saham (*agency conflict*). Para peneliti menyebutkan telah terjadi peningkatan konservatisme standar akuntansi secara global. Peningkatan itu disebabkan oleh meningkatnya tuntutan hukum, sehingga auditora dan manajer cenderung melindungi dirinya dengan selalu melaporkan angka-angka yang konservatif di dalam laporan keuangannya.

Berdasarkan kontrak yang efisien, konservatisme akuntansi menyatakan bahwa besarnya laba yang diantisipasi merupakan fungsi langsung dari kemampuan perusahaan dalam mengestimasi laba perusahaan dalam masa mendatang. Secara intuitif, prinsip konservatisme ini bermanfaat karena dapat digunakan untuk memprediksikan kondisi pada masa mendatang. Dengan kata lain, pemilihan suatu metode yang mendukung prinsip konservatisme memiliki *value relevance*. Logika ini dapat membantah kritik terhadap ketidakbergunaan laporan keuangan yang berdasarkan pada prinsip konservatisme.

2.1.2.4 Peluang Pemilihan Tingkat Konservatisme Oleh Manajemen

Salah satu pengertian mengenai tingkat konservatisme akuntansi adalah tingkat konservatisme akuntansi yang dipilih oleh manajemen dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Brigham (2015:105), menyatakan yang memberikan peluang bagi manajer untuk menyelenggarakan akuntansi konservatif antara lain:

1. PSAK No. 14 (Revisi 2008): Persediaan

Paragraf 21 menyatakan biaya untuk persediaan yang secara umum tidak dapat ditukar dengan persediaan lain (*not ordinary interchangeable*) dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing. Paragraf 23 menyatakan bahwa biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam paragraf 21, harus dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP).

Metode MPKP atau yang sering disebut dengan FIFO dalam metode penilaian persediaan menghasilkan laba yang lebih besar daripada metode LIFO dan rata-rata tertimbang (*weighted average cost method*) dalam laporan laba rugi perusahaan. Hal tersebut dikarenakan metode FIFO menghasilkan biaya persediaan akhir menjadi lebih besar sehingga harga pokok penjualan menjadi lebih kecil dan laba yang dihasilkan menjadi lebih besar. Oleh karena itu metode FIFO merupakan metode penilaian persediaan yang paling konservatif.

Hal tersebut berlaku jika kondisi perekonomian mengalami inflasi sehingga harga terus meningkat. Berbeda dengan laporan laba rugi akuntansi, laporan laba rugi fiscal hanya mengakui dua metode penilaian persediaan, yaitu

FIFO dan rata-rata tertimbang. Diantara kedua metode tersebut, metode rata-rata tertimbang merupakan metode yang paling konservatif karena menghasilkan biaya persediaan akhir yang lebih kecil sehingga harga pokok penjualan menjadi lebih besar dan laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil.

2. PSAK No. 17 (1994) tentang akuntansi penyusutan telah diganti oleh PSAK No. 16 (Revisi 2007) tentang asset tetap.

Dalam paragraf 65 menyatakan bahwa berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu asset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balancing method*), dan metode jumlah unit (*sum of the unit method*). Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset. Metode jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu asset. Metode penyusutan asset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari asset dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari asset tersebut.

Berdasarkan waktunya, jika periode penyusutan suatu perusahaan semakin pendek, maka akan lebih konservatif dan jika periode penyusutan semakin panjang maka semakin tidak konservatif. Hal tersebut dikarenakan jika periode penyusutan semakin pendek, maka biaya penyusutan menjadi lebih besar sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Diantara metode penyusutan

yang disebutkan dalam PSAK tersebut, metode penyusutan saldo menurun lebih konservatif dibanding metode lainnya. Tetapi hal tersebut hanya terjadi pada awal-awal periode penyusutan sedangkan pada saat menuju akhir periode penyusutan metode saldo menurun menjadi tidak konservatif.

3. PSAK No. 19 (Revisi 2000): Aset Tidak Berwujud

Paragraf 68 menyatakan bahwa terdapat berbagai metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah yang dapat diamortisasi dari suatu aktiva atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode-metode itu meliputi metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit produksi. Sama halnya dengan penyusutan, jika periode amortisasi semakin pendek, maka akan lebih konservatif dan jika periode amortisasi semakin panjang, maka semakin tidak konservatif.

Hal tersebut dikarenakan jika periode amortisasi semakin pendek, maka biaya amortisasi tiap periode menjadi lebih besar sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Sama seperti dengan penyusutan pula, diantara metode amortisasi yang disebutkan dalam PSAK, metode amortisasi saldo menurun merupakan metode yang paling konservatif diantara metode lain yang ada. Lebih lanjut, paragraf 69 menyatakan bahwa amortisasi biasanya diakui sebagai beban. Namun kadang-kadang manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu asset lain tidak menimbulkan beban.

Dalam hal demikian beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok asset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam nilai tercatatnya. Misalnya, amortisasi asset tidak berwujud yang digunakan dalam proses produksi dimasukkan dalam nilai tercatat. Kesimpulan yang dapat diambil dari paragraph

69 tersebut adalah bahwa apabila amortisasi suatu asset tidak berwujud diakui sebagai bagian dari harga pokok asset lainnya, hal tersebut dapat membuat laba yang dihasilkan dalam laporan keuangan menjadi besar atau tidak konservatif. Sebaliknya, jika amortisasi tersebut diakui sebagai beban, maka laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil atau konservatif.

4. PSAK No. 20: Biaya Riset dan Pengembangan telah diganti oleh PSAK No. 19: Aktiva tidak Berwujud.

Paragraf 36 menyatakan bahwa perusahaan tidak boleh mengakui aktiva tidak berwujud yang timbul dari riset (atau tahap riset pada suatu proyek internal). Pengeluaran untuk riset (atau tahap riset untuk suatu proyek internal) diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pada paragraph 39 menyatakan bahwa suatu aktiva tidak berwujud timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan dari suatu proyek internal) diakui jika, dan hanya jika perusahaan dapat menunjukkan enam kriteria tertentu. Laporan keuangan akan menjadi lebih konservatif jika biaya riset dan pengembangan diakui sebagai beban daripada sebagai aktiva. Biaya riset dan pengembangan yang diakui sebagai beban mengakibatkan laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Sedangkan biaya riset dan pengembangan yang diakui sebagai aktiva mengakibatkan laba yang dihasilkan menjadi lebih besar dan tidak konservatif.

2.1.2.5 Indikator Konservatisme Akuntansi

Brigham (2015:123), menyatakan indikator konservatisme akuntansi adalah sebagai berikut:

$K_{Ait} = NI_{it} - CFO_{it}$
--

Keterangan:

KA_{it} = Tingkat konservatisme perusahaan i pada tahun t

NI_{it} = Laba sebelum *extraordinary item* ditambah dengan depresiasi perusahaan i pada tahun t.

CFO_{it} = *Cash flow* dari kegiatan operasi untuk perusahaan i pada tahun t.

1. Jika nilai $KA_{it} > 0$, artinya perusahaan itu mempunyai tingkat konservatisme akuntansi yang tinggi.
2. Jika nilai $KA_{it} < 0$, artinya perusahaan itu mempunyai tingkat konservatisme akuntansi yang rendah.

Perusahaan dikatakan memiliki tingkat konservatisme akuntansi yang tinggi jika nilai KA_{it} di atas nol (positif). Hal ini dikarenakan laba yang tercantum di dalam laporan keuangan lebih besar daripada kas yang tersedia untuk kegiatan operasional. Sebaliknya perusahaan akan dikatakan memiliki tingkat konservatisme akuntansi yang rendah jika nilai KA_{it} di bawah nol (negatif). Hal ini dikarenakan laba yang tercantum di laporan keuangan lebih kecil daripada kas yang tersedia untuk kegiatan operasional.

2.1.3 Komisaris Independen

Brigham (2015:34), menyatakan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang kedudukannya sama dengan anggota dewan komisaris lainnya, yakni sebagai badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. Jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris diatur dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek pasal 19 ayat 2. Persentase dewan komisaris independen diatas 30 persen adalah salah satu indikator bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi sehingga mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* (Brealey, 2015:45). Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham dan pihak-pihak yang terkait (Martono, 2015:29).

Beberapa kriteria komisaris independen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dalam pasal 22 adalah sebagai berikut :

1. Komisaris independen bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan Efek tersebut dalam waktu 5 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan Efek pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan Efek.

3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan Efek, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek.
4. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perusahaan Efek.

Menurut Brigham (2053:34), indikator dewan komisaris independen adalah sebagai berikut:

$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Komisaris}} \times 100\%$

2.1.4 Komite Audit

Husnan (2015:72), menyatakan komite audit adalah salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Fungsi dari komite audit adalah untuk memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan serta membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat.

Riyanto (2015:81), menyatakan keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 anggota dimana seorang anggota diantaranya merupakan Komisaris Independen, sedangkan dua anggota lainnya merupakan pihak eksternal

yang independen, dan salah satu diantaranya harus memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan. Anggota komite audit tidak boleh menerima imbalan dari perusahaan dan tidak boleh mengendalikan atau memiliki hak suara sebesar 5% atau lebih, dan tidak boleh menjabat sebagai eksekutif, komisaris, rekanan, atau karyawan perusahaan (Jogiyanto, 2016:33). Komite audit harus menetapkan prosedur untuk perlakuan terhadap keluhan terkait pengendalian akuntansi atau masalah audit.

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris. Fahmi (2018:89) menyatakan berpendapat bahwa keberadaan komite audit setidaknya terdiri dari tiga anggota, yang salah satunya independen dan juga menjadi ketua komite audit, sementara yang lain adalah pihak eksternal yang independen. Menurut Darmadji (2016:55), menyatakan bahwa peran komite audit berhubungan dengan tugas memberikan nasihat dan masukan terkait, komunikasi dengan KAP, memberi laporan kepada dewan komisaris terhadap proses dan isu audit, melakukan review terhadap informasi keuangan yang akan disampaikan kepada pemegang saham dan pihak lainnya yang berkepentingan, memberikan masukan tentang berbagai hal terkait akuntabilitas dewan komisaris, sertamemastikan kepatuhan terhadap implementasi CG sesuai dengan peraturan atau standar yang telah ditetapkan. Husnan (2015:75), menyatakan untuk menghitung proporsi komite audit dalam perusahaan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Komisaris Independen Dalam Komite Audit}}{\text{Total Komite Audit}} \times 100\%$$

2.1.5 Tax Avoidance

Sartono (2015:83), menyatakan *tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah usaha mengurangi pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada. *Tax avoidance* merupakan penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan strategi di bidang perpajakan yang digunakan. Indonesia menganut sistem perpajakan *self assesment* dimana para wajib pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. *Tax avoidance* merupakan salah satu bentuk dari *tax planning*. *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Sudana, 2015:70). Metode dan teknik yang digunakan dalam *tax avoidance* adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Komite urusan fiskal dari OECD (*Organization for Economic Corporation and Development*) mendeskripsikan bahwa *tax avoidance* adalah usaha wajib pajak untuk mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of law*) (Tandelin, 2015:37). *Tax avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* tidak termasuk pelanggaran pajak karena dalam hal ini usaha yang dilakukan wajib pajak dalam melakukan *tax avoidance* adalah untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan dan meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang

dimungkinkan oleh Undang-Undang. Sartono (2015:83), menyatakan variabel *tax avoidance* dihitung dengan menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*). Rumus untuk menghitung ETR (*Effective Tax Rate*) adalah sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

2.2. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil penelitian
1	Pramudito (2015)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris	<i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linier Sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Susanti (2018)	Pengaruh Konservatisme, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Konservatisme, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan	<i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linier Sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konservatisme, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
3	Iriawan (2017)	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage	<i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linier Sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage berpengaruh signifikan terhadap <i>tax</i>

						<i>avoidance.</i>
4	Damayanti (2015)	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan <i>Return On Assets</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan <i>Return On Assets</i>	<i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linier Sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan <i>Return On Assets</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance.</i>
5	Eksandy (2017)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014).	Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit	<i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linier Sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance.</i>

Sumber : Diolah Penulis 2021

2.3 Kerangka Konseptual

2.3.1 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance*

Brigham (2015:77), menyatakan di dalam perpajakan prinsip konservatisme dapat terlihat pada beberapa kebijakan pemerintah seperti tidak diperkenalkannya membentuk cadangan piutang ragu-ragu kecuali untuk bank dan *leasing* dengan hak opsi serta perusahaan asuransi dan cadangan biaya reklame untuk usaha pertambangan dan hanya menggunakan metode harga perolehan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO) tidak

boleh menggunakan (LIFO) untuk menilai persediaan dan pemakaian untuk perhitungan harga pokok.

Prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan di dalam perpajakan. Prinsip konservatisme akuntansi digunakan bukan sebagai alasan untuk mengurangi besar pajak yang dibayarkan wajib pajak atau perusahaan akan tetapi prinsip konservatisme merupakan tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan yang mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba.

2.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Brigham (2015:91), menyatakan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang kedudukannya sama dengan anggota dewan komisaris lainnya, yakni sebagai badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. Kehadiran komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Bertambahnya anggota dewan komisaris independen mungkin dimaksudkan mematuhi regulasi yang ditetapkan. Teori agensi menyatakan bahwa upaya *principal* untuk dapat mengawasi *agent* adalah dengan menghadirkan pihak ketiga yang independen. Anggota dewan yang independen berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain. Tanpa adanya pengawasan yang independen, akan semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi dan melakukan *tax avoidance*. Hal tersebut akan merugikan pemegang saham.

Adanya komisaris independen akan membuat manajemen berhati-hati dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kebijakan perusahaan.

Komisaris independen akan mengawasi kinerja dewan komisaris maupun direksi dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan. Pengawasan yang semakin ketat dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif. Hal ini berarti adanya komisaris independen efektif dalam mencegah tindakan *tax avoidance*.

Kehadiran komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut mengasumsikan bahwa komisaris independen memiliki efek yang berarti terhadap penghindaran pajak. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat, sehingga penghindaran pajak dapat ditekan.

2.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Brigham (2015:102), menyatakan komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dalam cara yang dapat menghindari resiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk penghindaran pajak. Di dalam *corporate governance* terdapat prinsip akuntabilitas, hal ini dimaksudkan agar setiap unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan diungkapkan dapat di informasikan secara *akuntable*, selain itu pembentukan komite audit juga diharapkan mampu mengurangi *agency problem* dalam perusahaan.

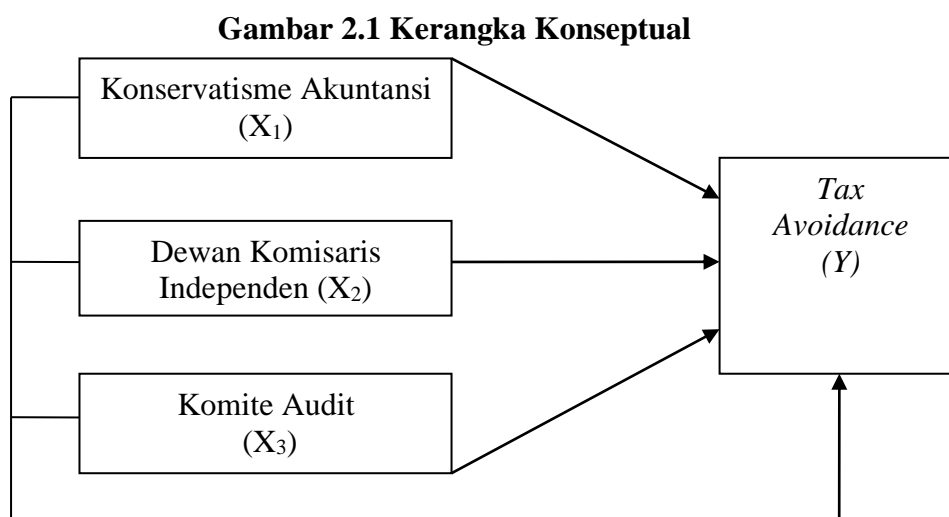
Berdasarkan teori agensi, semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan *tax avoidance* dapat diminimalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit yang melakukan tugasnya dengan baik akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan selalu mengawasi segala kegiatan di dalam perusahaan, sehingga akan meminimalisir tindakan *tax avoidance*. Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.4 Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Brigham (2015:110), menyatakan prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan di dalam perpajakan. Prinsip konservatisme akuntansi digunakan bukan sebagai alasan untuk mengurangi besar pajak yang dibayarkan wajib pajak atau perusahaan akan tetapi prinsip konservatisme merupakan tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan yang mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba. Kehadiran komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut mengasumsikan bahwa komisaris independen memiliki efek yang berarti terhadap penghindaran pajak. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat, sehingga penghindaran pajak dapat ditekan.

Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan *tax avoidance* dapat diminimalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit yang melakukan tugasnya dengan baik akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan selalu mengawasi segala kegiatan di dalam perusahaan, sehingga akan meminimalisir tindakan *tax avoidance*.

Dari penjelasan di atas maka disusun kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Sumber : Diolah Penulis 2021

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kajian empiris di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Dewan komisaris independen akuntansi berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Komite Audit akuntansi berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Konservatisme akuntansi, dewan komisaris independen dan komite audit secara simultan berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Sugiyono (2015), menyatakan metode penelitian asosiatif yaitu penelitian yang di maksudkan untuk mengungkapkan permasalahan yang bersifat sebab akibat antara dua variabel atau lebih.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan situs www.idnfinancials.com.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan April 2021 sampai dengan Juli 2021.

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan											
		April 2021			Mei 2021			Juni 2021			Juli 2021		
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■											
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■						
3	Seminar Proposal							■	■				
4	Perbaikan Acc Proposal									■			
5	Pengolahan Data										■		
6	Penyusunan Skripsi											■	
7	Bimbingan Skripsi											■	■
8	Meja Hijau												■

Sumber : Diolah Penulis 2021

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu konservatisme akuntansi (X_1), dewan komisaris independen (X_2) dan komite audit (X_3), serta 1 (satu) variabel terikat yaitu *tax avoidance* (Y).

3.3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
1	Konservatisme Akuntansi (X_1)	Suatu prinsip pengecualian atau modifikasi dalam arti bahwa prinsip tersebut bertindak sebagai batasan terhadap penyajian data akuntansi yang relevan dan andal. (Brigham, 2013:94)	$\text{Kait} = \frac{\text{NIit} - \text{CFOit}}{\text{Total}} \times 100\%$	Rasio
2	Dewan Komisaris Independen (X_2)	Anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang kedudukannya sama dengan anggota dewan komisaris lainnya, yakni sebagai badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. (Brigham, 2013:34).	$\frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Komisaris}} \times 100\%$	Rasio
3	Komite Audit (X_3)	Salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. (Husnan, 2014:72).	$\frac{\text{Komisaris Independen Dalam Komite Audit}}{\text{Total Komite Audit}} \times 100\%$	Rasio
4	<i>Tax Avoidance</i> (Y)	Usaha mengurangi pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada. (Sartono, 2015:83).	$\frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$	Rasio

Sumber : Diolah Penulis 2021

3.4 Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Populasi

Sugiyono (2015), menyatakan populasi adalah sekelompok entitas yang lengkap yang dapat berupa orang, kejadian, atau benda yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2019 yang berjumlah 26 perusahaan.

3.4.2 Sampel

Sugiyono (2015), menyatakan sampel adalah bagian populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Dalam Sugiyono (2015) pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu.

Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan tertentu tertentu. Adapun kriteria yang ditetapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2015-2019).
2. Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit selama periode pengamatan (2015-2019).

Tabel 3.3 Populasi dan Sampel Perusahaan

No	KODE	Nama Emiten	Kriteria		Sampel
			1	2	
1	AISA	PT. Tiga Pilar Sejahtera, Tbk	√	X	X
2	ALTO	PT. Tri Banyan Tirta, Tbk	√	√	X
3	CAMP	PT. Campina Ice Cream Industry Tbk	X	X	X
4	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk	√	√	1
5	CLEO	PT. Sariguna Primatirta, Tbk	X	X	X
6	COCO	PT. Wahana Interfood Nusantara, Tbk	X	X	X
7	DLTA	PT. Delta Djakarta, Tbk	√	√	X
8	DMND	PT. Diamond Food Indonesia, Tbk	X	X	X
9	FOOD	PT. Sentra Food Indonesia, Tbk	X	X	X
10	GOOD	PT. Garudafood Putra Putri Jaya, Tbk	X	X	X
11	HOKI	PT. Buyung Poetra Sembada, Tbk	X	X	X
12	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk	√	√	2
13	IKAN	PT. Era Mandiri Cemerlang, Tbk	X	X	X
14	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk	√	√	3
15	KEJU	PT. Mulia Boga Raya, Tbk	X	X	X
16	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk	√	√	4
17	MYOR	PT. Mayora Indah, Tbk	√	√	5
18	PANI	PT. Pratama Abadi Nusa Industri, Tbk	X	X	X
19	PCAR	PT. Prima Cakrawala Abadi, Tbk	X	X	X
20	PSDN	PT. Prashida Aneka Niaga, Tbk	√	√	X
21	PSGO	PT. Palma Serasih, Tbk	X	X	X
22	ROTI	PT. Nippon Indosari Corporindo, Tbk	√	√	6
23	SKBM	PT. Sekar Bumi, Tbk	√	√	7
24	SKLT	PT. Sekar Laut, Tbk	√	√	8
25	STTP	PT. Siantar Top, Tbk	√	X	X
26	ULTJ	PT. Ultrajaya Milk Industry, Tbk	√	√	9

Sumber : <https://www.idnfinancials.com> dan www.sahamok.com (2021)

Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 9 perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

3.4.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data sekunder dalam bentuk kuantitatif yaitu data yang diukur berdasarkan skala numerik seperti nilai rasio. Data penelitian tersebut diperoleh peneliti dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara rutin setiap periodenya pada Bursa Efek Indonesia. Data tersebut tersedia dalam situs <https://www.idnfinancials.com>.

3.4.4 Sumber Data

Adapun sumber data tersebut tersedia dalam situs <https://www.idnfinancials.com>. Periode data penelitian ini meliputi data dari tahun 2015 sampai 2019.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan keuangan tahunan maupun informasi yang terkait dengan lingkup penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Statistik deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisa data kuantitati secara *deskriptif*. Ghazali (2015:29), menyatakan statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemencengan distribusi)". Berdasarkan data olahan SPSS maka akan dapat diketahui nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari setiap variabel.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik adalah asumsi yang mendasari analisis regresi dengan tujuan mengukur asosiasi atau keterikatan antarvariabel bebas. Terdapat 3 (tiga) pengujian terkait uji asumsi klasik yaitu uji *normalitas* data, uji *multikolinearitas* dan uji *autokorelasi*.

1. Uji Normalitas Data

Ghozali (2015 : 110), menyatakan uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas terdiri dari:

1. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat membingungkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari analisis normal *probability plot* sebagai berikut:

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Analisis Statistik

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan pula melalui analisis statistik yang salah satunya dapat dilihat melalui *Kolmogorov-Smirnov test* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 = Data residual terdistribusi normal

H_a = Data residual tidak terdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan secara statistik maka H_0 ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal.
- 2) Apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan statistik maka H_0 diterima, yang berarti data terdistribusi normal.

Pedoman pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai sig. atau signifikan atau nilai probabilitas $< 0,05$ distribusi adalah tidak normal.
- 2) Nilai sig. atau signifikan atau nilai probabilitas $> 0,05$ distribusi adalah normal.

2. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2015 : 91), menyatakan uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antaravariabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* $> 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* < 10 .

3. Uji Autokorelasi

Erlina (2015: 106), menyatakan uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ atau sebelumnya. Penentuan ada

tidaknya autokorelasi dapat digunakan dengan uji *run test*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *run test* yaitu :

- 1) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil < dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi.
- 2) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar > dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedasitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedasitas; dan jika varians berbeda disebut heterokedasitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedasitas. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedasitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedasitas.

3.6.3 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda yaitu suatu analisis yang menguji pengaruh konservatisme akuntansi, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap tax avoidance, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Tax Avoidance (*Dependent Variabel*)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

X₁ = Konservatisme Akuntansi (*Independent Variabel*)

X₂ = Dewan Komisaris Independen (*Independent Variabel*)

X₃ = Komite Audit (*Independent Variabel*)

ϵ = *Error term*

3.6.4 Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

1. Uji Secara Parsial (Uji t)

Erlina (2015:108), menyatakan uji parsial (t) menunjukkan seberapa jauh variabel *exogenous*, terhadap variabel *endogenous*". Bentuk pengujiannya : Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam penelitian ini jika H₀ diterima maka variabel tidak berpengaruh dan jika H_a diterima maka variabel berpengaruh. Sugiyono (2015:17), menyatakan pengujian menggunakan Uji t dengan tingkat signifikansi t tabel (α) = 0.05 dan dengan derajat kebebasan dk = n-1.

Kriteria pengambilan keputusan :

H₀ diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H₁ diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Atau dapat juga menggunakan nilai signifikan:

- a. Jika Sig < 0.05 = H₀ ditolak sehingga H₁ diterima, artinya berpengaruh signifikan.

- b. Jika $\text{Sig} > 0.05 = H_0$ diterima sehingga H_1 ditolak, artinya berpengaruh tidak signifikan.

2. Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel bebas memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikat. Untuk menganalisis apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka dapat dilihat nilai F yakni pada nilai probabilitasnya.

Hipotesisnya adalah:

H_0 : terdapat pengaruh yang tidak signifikan

H_a : terdapat pengaruh yang signifikan

Adapun kriteria penerimaan/penolakan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tolak H_0 jika nilai probabilitas yang dihitung $<$ probabilitas yang ditetapkan sebesar 0,05 ($\text{Sig} < \alpha 0,05$).
- 2) Terima H_0 jika nilai probabilitas yang dihitung $>$ probabilitas yang ditetapkan sebesar 0,05 ($\text{Sig} > \alpha 0,05$).

3. Uji Determinasi (Uji R^2)

Erlina (2015:108), menyatakan uji determinasi (R^2) mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel bebas terhadap variasi naik turunnya variabel terikat secara bersama-sama. R^2 mendekati satu maka dapat dikatakan semakin kuat kemampuan variabel bebas dalam model regresi tersebut dalam menerangkan variabel terikatnya. Sebaliknya jika R^2 mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variabel bebas menerangkan variasi variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Tentang Perusahaan

1. Sejarah Singkat Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Jakarta pertama kali dibuka pada tanggal 14 desember 1912, dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda, didirikan di Batavia, pusat pemerintahan kolonial Belanda yang kita kenal sekarang dengan Jakarta. Bursa Efek Jakarta dulu disebut *Call-Efek*. Sistem perdagangannya seperti lelang, dimana tiap efek berturut-turut diserukan pemimpin “*Call*”, kemudian para pialang masing-masing mengajukan permintaan beli atau penawaran jual sampai ditemukan kecocokan harga, maka transaksi terjadi. Pada saat itu terdiri dari 13 perantara pedagang efek (makelar).

Bursa saat itu bersifat *demand-following*, karena para investor dan para perantara pedagang efek merasakan keperluan akan adanya suatu bursa efek di Jakarta. Bursa lahir karena permintaan akan jasanya sudah mendesak. Orang-orang Belanda yang bekerja di Indonesia saat itu sudah lebih dari tiga ratus tahun mengenal akan investasi dalam efek, dan penghasilan serta hubungan mereka memungkinkan mereka menanamkan uangnya dalam aneka rupa efek. Baik efek dari perusahaan yang ada di Indonesia maupun efek dari luar negeri. Sekitar 30 sertifikat (sekarang disebut *depository receipt*) perusahaan Amerika, perusahaan Kanada, perusahaan Belanda, perusahaan Prancis dan perusahaan Belgia.

Bursa Efek Jakarta sempat tutup selama periode perang dunia pertama, kemudian di buka lagi pada tahun 1925. Selain Bursa Efek Jakarta, pemerintah kolonial juga mengoperasikan bursa parallel di Surabaya dan Semarang. Namun kegiatan bursa ini di hentikan lagi ketika terjadi pendudukan tentara Jepang di Batavia.

Aktivitas di bursa ini terhenti dari tahun 1940 sampai 1951 di sebabkan perang dunia II yang kemudian disusul dengan perang kemerdekaan. Baru pada tahun 1952 di buka kembali, dengan memperdagangkan saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Belanda di nasionalisasikan pada tahun 1958. Meskipun pasar yang terdahulu belum mati karena sampai tahun 1975 masih ditemukan kurs resmi bursa efek yang dikelola Bank Indonesia.

Bursa Efek Jakarta kembali dibuka pada tanggal 10 Agustus 1977 dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM), institusi baru di bawah Departemen Keuangan. Kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar saham pun mulai meningkat seiring dengan perkembangan pasar finansial dan sektor swasta yang puncak perkembangannya pada tahun 1990. Pada tahun 1991, bursa saham diswastanisasi menjadi PT. Bursa Efek Jakarta dan menjadi salah satu bursa saham yang dinamis di Asia. Swastanisasi bursa saham ini menjadi PT. Bursa Efek Jakarta mengakibatkan beralihnya fungsi BAPEPAM menjadi Badan Pengawas Pasar Modal.

Bursa efek terdahulu bersifat *demand-following*, namun setelah tahun 1977 bersifat *supply-leading*, artinya bursa dibuka saat pengertian mengenai bursa pada masyarakat sangat minim sehingga pihak BAPEPAM harus berperan aktif langsung dalam memperkenalkan bursa.

Pada tahun 1977 hingga 1978 masyarakat umum tidak atau belum merasakan kebutuhan akan bursa efek. Perusahaan tidak antusias untuk menjual sahamnya kepada masyarakat. Tidak satupun perusahaan yang memasyarakatkan sahamnya pada periode ini. Baru pada tahun 1979 hingga 1984 dua puluh tiga perusahaan lain menyusul menawarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Namun sampai tahun 1988 tidak satu pun perusahaan baru menjual sahamnya melalui Bursa Efek Jakarta.

Untuk lebih mengairahkan kegiatan di Bursa Efek Jakarta, maka pemerintah telah melakukan berbagai paket deregulasi, antarlain seperti: paket Desember 1987, paket Oktober 1988, paket Desember 1988, paket Januari 1990, yang prinsipnya merupakan langkah-langkah penyesuaian peraturan-peraturan yang bersifat mendorong tumbuhnya pasar modal secara umum dan khususnya Bursa Efek Jakarta.

Setelah dilakukan paket-paket deregulasi tersebut Bursa Efek Jakarta mengalami kemajuan pesat. Harga saham bergerak naik cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tenang. Perusahaan-perusahaan pun akhirnya melihat bursa sebagai wahana yang menarik untuk mencari modal, sehingga dalam waktu relative singkat sampai akhir tahun 1997 terdapat 283 emiten yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.

Tahun 1995 adalah tahun Bursa Efek Jakarta memasuki babak baru, karena pada tanggal 22 Mei 1995 Bursa Efek Jakarta meluncurkan *Jakarta Automated Trading System* (JATS). JATS merupakan suatu sistem perdagangan manual. Sistem baru ini dapat memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi

yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang fair dan transparan di banding sistim perdagangan manual.

Pada bulan Juli 2000, Bursa Efek Jakarta merupakan perdagangan tanpa warkat (*ckripess trading*) dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar dan menghindari peristiwa saham hilang dan pemalsuan saham, serta untuk mempercepat proses penyelesaian transaksi.

Tahun 2001 Bursa Efek Jakarta mulai menerapkan perdagangan jarak jauh (*Remote Trading*), sebagai upaya meningkatkan akses pasar, efisiensi pasar, kecepatan dan frekuensi perdagangan.

Tahun 2007 menjadi titik penting dalam sejarah perkembangan Pasar Modal Indonesia. Dengan persetujuan para pemegang saham kedua bursa, BES digabungkan ke dalam BEJ yang kemudian menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tujuan meningkatkan peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2008, Pasar Modal Indonesia terkena imbas krisis keuangan dunia menyebabkan tanggal 8-10 Oktober 2008 terjadi penghentian sementara perdagangan di Bursa Efek Indonesia.. IHSG, yang sempat menyentuh titik tertinggi 2.830,26 pada tanggal 9 Januari 2008, terperosok jatuh hingga 1.111,39 pada tanggal 28 Oktober 2008 sebelum ditutup pada level 1.355,41 pada akhir tahun 2008. Kemerosotan tersebut dipulihkan kembali dengan pertumbuhan 86,98% pada tahun 2009 dan 46,13% pada tahun 2010.

Pada tanggal 2 Maret 2009 Bursa Efek Indonesia meluncurkan sistim perdagangan baru yakni *Jakarta Automated Trading System Next Generation* (JATS Next-G), yang merupakan pengganti sistim JATS yang beroperasi sejak Mei 1995. sistem semacam JATS Next-G telah diterapkan di beberapa bursa

negara asing, seperti Singapura, Hong Kong, Swiss, Kolombia dan Inggris. JATS Next-G memiliki empat mesin (engine), yakni: mesin utama, back up mesin utama, disaster recovery centre (DRC), dan back up DRC. JATS Next-G memiliki kapasitas hampir tiga kali lipat dari JATS generasi lama .

Demi mendukung strategi dalam melaksanakan peran sebagai fasilitator dan regulator pasar modal, BEI selalu mengembangkan diri dan siap berkompetisi dengan bursa-bursa dunia lainnya, dengan memperhatikan tingkat risiko yang terkendali, *instrument* perdagangan yang lengkap, sistem yang andal dan tingkat likuiditas yang tinggi. Hal ini tercermin dengan keberhasilan BEI untuk kedua kalinya mendapat penghargaan sebagai “The Best Stock Exchange of the Year 2010 in Southeast Asia. Saat ini, BEI mempunyai tujuh macam indeks saham:

1. IHSG, menggunakan semua saham tercatat sebagai komponen kalkulasi Indeks.
2. Indeks Sektoral, menggunakan semua saham yang masuk dalam setiap sektor.
3. Indeks LQ45, menggunakan 45 saham terpilih setelah melalui beberapa tahapan seleksi.
4. Indeks Individual, yang merupakan Indeks untuk masing-masing saham didasarkan harga dasar.
5. Jakarta Islamic Index, merupakan Indeks perdagangan saham syariah.
6. Indeks Papan Utama dan PapanPengembang, indeks yang didasarkan pada kelompok saham yang tercatat di BEI yaitu kelompok Papan Utama dan Papan Pengembangan.
7. Indeks Kompas 100, menggunakan 100 saham.

Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal dapat dilihat sebagai berikut:

a. 14 Desember 1912

Tahun inilah awal dimana Bursa Efek pertama di Indonesia didirikan di Batavia oleh Pemerintah yang berkuasa saat itu, yaitu pemerintah Hindia Belanda. Sebagai tahap awal, perusahaan sekuritas yang menjadi pilang untuk para investor, baru berdiri 13 perusahaan saja, di antaranya Fa. Dunlop & Kolf dan Fa. Gebroeders.

b. 1914 – 1918

Dan akibat dari perang dunia, tepatnya Perang Dunia ke I waktu itu, maka Bursa Efek di Batavia ditutup untuk sementara waktu.

c. 1925 – 1942

Seiring dengan kondusifnya keadaan pemerintahan hindia Belanda, maka antara tahun 1925-1942 Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali dan bersamaan dengan dengan dibukanya bursa di Jakarta, maka Bursa Efek di Semarang dan Surabaya juga mulai dibuka.

d. Awal 1939

Sama halnya pada kurun waktu antara tahun 1914 – 1918 yang mana waktu itu bursa efek di Batavia ditutup, maka pada tahun 1939 juga terjadi hal yang sama, hanya saja isu politiknya kala ini adalah karena efek dari Perang Dunia II. Dan bursa yang mengalami dampaknya adalah Bursa Efek di Semarang dan Surabaya.

e. 1942 – 1952

Lagi-lagi karena isu perang Dunia. Bursa Efek di Jakarta akhirnya ditutup kembali selama berlangsungnya Perang Dunia II.

f. 1956

Akibat dijalankannya program nasionalisasi perusahaan Belanda, perkembangan Bursa Efek semakin tidak tampak karena sempat tidak aktif lagi. Jadi setelah ditutup karena efek perang, suara hilir mudik investor makin tidak nampak karena program tersebut.

g. 1956 – 1977

Berbeda dengan sebelumnya, di tahun-tahun ini walau bursa buka, perdagangan di Bursa Efek vakum.

h. 10 Agustus 1977

Bursa mulai hidup kembali setelah diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Sebagai perusahaan, BEJ saat itu dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal) – sekarang sudah diganti OJK. Diresmikannya kembali pasar modal ini juga dibarengi dengan go public / IPO dari PT Semen Cibinong selaku emiten pertama waktu itu. Ini sekaligus menjadi jalan perkembangan Bursa Efek Indonesia yang baru.

i. 1977 – 1987

Transaksi di Bursa Efek tampak seperti tak ada aktifitasnya dan bisa kita katakan tidak nampak perkembangannya. Jumlah emiten yang terdaftar hingga 1987 bahkan baru berjumlah 24. Karena kurang popolernya bursa efek saat itu dan masih enggan nya perusahaan mendaftarkan usahanya

maka banyak masyarakat kemudian lebih memilih instrumen perbankan dibanding instrumen Pasar Modal.

j. 1987

Sebagai inisiatif pemerintah menghidupkan pasar modal, maka lahir kebijakan PAKDES 87 atau Paket Desember 1987 yang mana memberikan kemudahan bagi para perusahaan untuk melakukan IPO atau Penawaran Umum Perdana dan juga investor asing yang diberi izin berinvestasi di Indonesia.

k. 1988 – 1990

Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal akhirnya diluncurkan. Dan semenjak pintu BEJ terbuka untuk umum, termasuk asing, maka tampaklah aktivitas transaksi di bursa meningkat.

l. 2 Juni 1988

Muncul yang namanya Bursa Paralel Indonesia (BPI) dan mulai beroperasi 2 Juni 1988 tersebut. Badan tersebut dikelola oleh PPUE atau Persatuan Perdagangan Uang dan Efek, sedangkan organisasinya terdiri dari dealer dan broker.

m. Desember 1988

Bisa dibilang jilid 2 lahirnya PAKDES, tapi kali ini dinamakan dengan PAKDES 88 yang mana isi kebijakannya memberikan kemudahan perusahaan untuk melakukan go public dan kebijakan lain yang pro bagi pertumbuhan pasar modal di Indonesia.

n. 16 Juni 1989

Di tahun ini sejarah baru perkembangan bursa di Indonesia dimana di tahun inilah Bursa Efek Surabaya (BES) mulai aktif dan dinahkodai oleh perusahaan bernama PT Bursa Efek Surabaya.

o. 13 Juli 1992

BEJ terkena dampak swastanisasi dan kemudian BAPEPAM sendiri berubah peran menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Dan tepat di tanggal ini juga menjadi HUT BEJ.

p. 22 Mei 1995

Di tahun ini perdagangan di bursa efek Jakarta mulai menggunakan sistem canggih yang disebut dengan Sistem Otomasi perdagangan JATS (Jakarta Automated Trading Systems).

q. 10 November 1995

Sebagai inisiatif dan guna menjamin berjalannya aktifitas pasar modal dengan baik di Indonesia maka pemerintah melahirkan Undang –Undang No. 8 Tahun 1995 yani tentang Pasar Modal.

r. 1995

Bursa Paralel Indonesia melakukan merger dengan Bursa Efek Surabaya

s. 2000

Sistem Perdagangan dengan Tanpa Warkat (scripless trading) akhirnya mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia.

t. 2002

Seiring dengan perkembangan zaman dan tingginya mobilisasi warga Indonesia, maupun asing, BEJ mulai menerapkan sistem perdagangan

jarak jauh (remote trading). Jadi, dengan sistem ini tidak perlu lagi langsung ke broker untuk membeli atau menjual saham.

u. 2007

Tahun inilah awal berdirinya BEI, yakni dengan digabungkannya Bursa Efek Surabaya (BES) dengan Bursa Efek Jakarta (BEJ) maka di Indonesia hanya dikenal satu perusahaan bursa, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI).

v. 02 Maret 2009

PT. Bursa Efek Indonesia meluncurkan sistem trading baru bernama: JATS-NextG.

w. 6 Januari 2014

Perubahan satuan lot yang baru mulai diberlakukan, dari sebelumnya 500 lembar saham per lot menjadi 100 lembar saja dalam tiap 1 lotnya.

x. 3 Januari 2017

Sistem auto rejection atau penolakan otomatis oleh JATS mengalami perubahan, yakni harga saham antara Rp 50-Rp 200 maka maksimal naik dan turunnya adalah 35 persen saja dalam sehari. Adapun harga saham antara Rp Rp 200-Rp 5.000 maka batas naik-turunnya 25 persen dalam sehari. Dan terakhir untuk yang di atas Rp 5.000 maka bisa naik dan turun 20 persen.

y. **19 Februari 2018**

IHSG mencatat sejarah baru poin tertingginya yang berada di level 6.689,29 yang merupakan poin tertinggi yang dicapai selama bursa saham di Indonesia didirikan.

2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi Perusahaan

Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.

b. Misi Perusahaan

Menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan *good governance*.

4.1.2 Statistik Deskriptif

Setelah data yang digunakan terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis dan melakukan evaluasi terhadap data tersebut. Sebelum di analisis dan dievaluasi data terlebih dahulu diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) yang kemudian hasil output tersebut akan dievaluasi untuk mengetahui variabel konservatisme akuntansi, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap tax avoidance.

Tabel 4.1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Konservatisme Akuntansi	45	.02	.93	.4453	.27829
Dewan Komisaris Independen	45	.00	4.00	1.7556	.88306
Komite Audit	45	3.00	5.00	3.0889	.41682
Tax Avoidance	45	.02	.65	.1677	.11646
Valid N (listwise)	45				

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2021)

Pada tabel 4.1 di atas diketahui nilai rata-rata dari variabel konservatisme akuntansi nilai minimum sebesar 0,02, maksimum sebesar 0,93, mean sebesar 0,4453 dan standar deviasinya adalah 0,27829. Variabel dewan komisaris independen nilai minimum sebesar 0,00, maksimum sebesar 4,00, mean sebesar

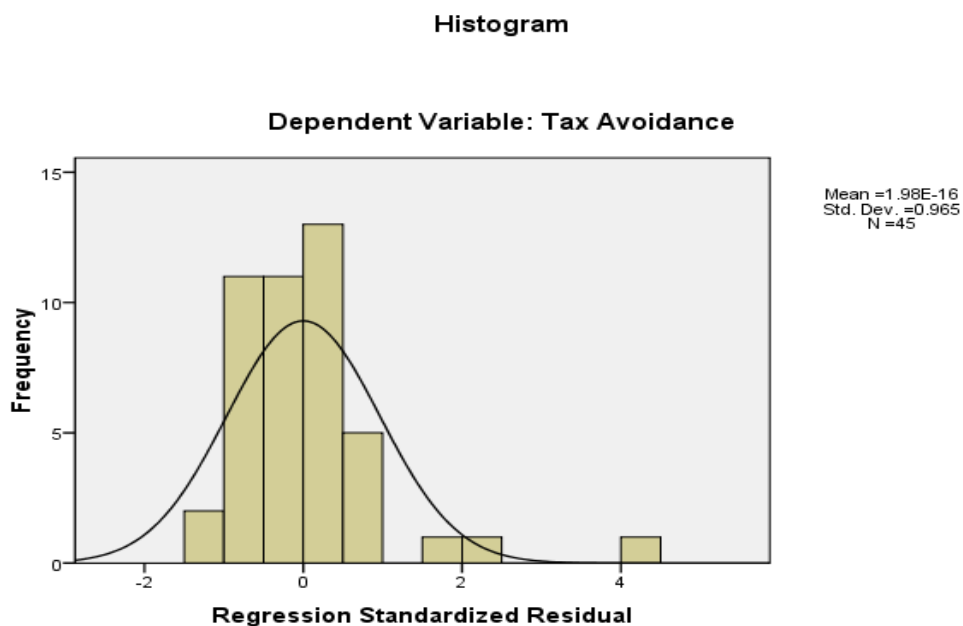
1,7556 dan standar deviasinya adalah 0,88306. Variabel komite audit nilai minimum sebesar 3,00, maksimum sebesar 5,00, mean sebesar 3,0889 dan standar deviasinya adalah 0,41682. Variabel tax avoidance nilai minimum sebesar 0,02, maksimum sebesar 0,65, mean sebesar 0,1677 dan standar deviasinya adalah 0,11646, dengan jumlah data sebanyak 45 data.

4.1.3 Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas data

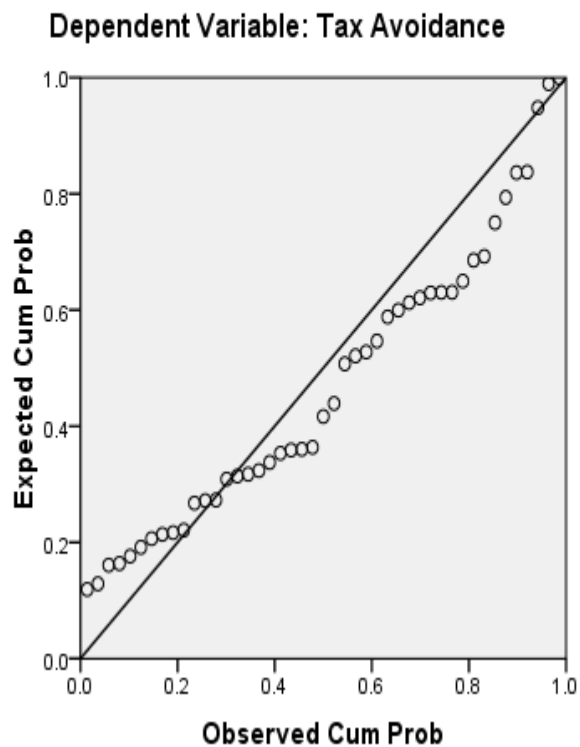
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal.

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2021)

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dengan melihat tampilan histogram uji normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa histogram menunjukkan pola distribusi normal.

Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

Untuk lebih memastikan apakah data disepanjang garis diagonal tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji Kolmogorov Smirnov (1 Sample KS) yakni dengan melihat data residualnya apakah distribusi normal atau tidak. Jika nilai $Asym.sig (2-tailed) > taraf\ nyata (\alpha = 0.05)$ maka data residual berdistribusi normal.

Tabel 4.2
Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11415265
Most Extreme Differences	Absolute	.146
	Positive	.146
	Negative	-.111
Kolmogorov-Smirnov Z		.978
Asymp. Sig. (2-tailed)		.295
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2021)

Pada tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengolahan data tersebut, besar nilai signifikansi *kolmogorov Smirnov* sebesar 0,295 maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal, dimana nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 ($p= 0,295 > 0,05$).

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai – nilai observasi data telah terdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear diantara variabel bebas dalam model regresi. Hasil pengujian multikolinearitas dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.016	.151	.102	.919		
	Konservatisme Akuntansi	.011	.066	4.165	.040	.943	1.061
	Dewan Komisaris Independen	.004	.021	5.187	.033	.957	1.045
	Komite Audit	.053	.043	6.223	.028	.973	1.028

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2021)

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa semua variabel bebas tidak terkena masalah multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai $VIF < 10$ dan *Tolerance* $> 0,10$. Untuk variabel konservatisme akuntansi memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,943 dan VIF sebesar 1,061. Variabel dewan komisaris independen memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,957 dan VIF sebesar 1,045. Variabel komite audit memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,973 dan VIF sebesar 1,028.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan periode $(t-1)$ atau sebelumnya. Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan dengan uji *run test*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *run test* yaitu :

- a. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil $<$ dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi.
- b. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar $>$ dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.02486
Cases < Test Value	22
Cases >= Test Value	23
Total Cases	45
Number of Runs	26
Z	.607
Asymp. Sig. (2-tailed)	.544

a. Median

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2021)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,544 > dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

4.1.4 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel konservatisme akuntansi, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap tax avoidance.

Tabel 4.5
Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.016	.151	.102	.919		
	Konservatisme Akuntansi	.011	.066	4.165	.040	.943	1.061
	Dewan Komisaris Independen	.004	.021	5.187	.033	.957	1.045
	Komite Audit	.053	.043	6.223	.028	.973	1.028

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2021)

Tabel 4.5 pada kolom *unstandardized coefficients* beta dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,016 + 0,011 X_1 + 0,004 X_2 + 0,053 X_3$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

1. Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap tidak ada maka tax avoidance (Y) adalah sebesar 0,016.
2. Jika terjadi peningkatan konservatisme akuntansi sebesar 1, maka tax avoidance (Y) akan meningkat sebesar 0,011.
3. Jika terjadi peningkatan dewan komisaris independen sebesar 1, maka tax avoidance (Y) akan meningkat sebesar 0,004.
4. Jika terjadi peningkatan komite audit sebesar 1, maka tax avoidance (Y) akan meningkat sebesar 0,053.

4.1.5 Uji Hipotesis

1. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Tabel 4.6
Uji Simultan
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.023	3	.008	5.559	.045^a
	Residual	.573	41	.014		
	Total	.597	44			

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Konservatisme Akuntansi

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2021)

Berdasarkan tabel 4.6 perhitungan uji F dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah $5,559 > F_{tabel} 2,83$, dengan signifikansi $0,045 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu konservatisme akuntansi, dewan

komisaris independen dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji secara parsial (Uji t) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7
Uji Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.016	.151	.102	.919		
	Konservatisme Akuntansi	.011	.066	4.165	.040	.943	1.061
	Dewan Komisaris Independen	.004	.021	5.187	.033	.957	1.045
	Komite Audit	.053	.043	6.223	.028	.973	1.028

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2021)

Berdasarkan tabel 4.7 untuk mengetahui pengaruh variabel independen konservatisme akuntansi, dewan komisaris independen dan komite audit secara parsial terhadap variabel dependen tax avoidance adalah sebagai berikut :

- a. Konservatisme akuntansi memiliki $t_{hitung} (4,165) > t_{tabel} (2,019)$ dan signifikan $0,040 < 0,05$. Artinya secara parsial konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Dewan komisaris independen memiliki $t_{hitung} (5,187) > t_{tabel} (2,019)$ dan signifikan $0,033 < 0,05$. Artinya secara parsial dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada

perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

- c. Komite audit memiliki $t_{hitung} (6,223) > t_{tabel} (2,019)$ dan signifikan $0,028 < 0,05$. Artinya secara parsial komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel konservatisme akuntansi, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap tax avoidance. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai *Adjusted R Square* yang mendekati satu berarti variabel independen penelitian memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel tax avoidance. Pada penelitian ini digunakan *Adjusted R Square*, karena variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.508 ^a	.258	.400	.11826

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Konservatisme Akuntansi

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2021)

Dari tabel 4.8 koefisien determinasi di atas, dapat dilihat bahwa Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,400. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel

dependen sebesar 40,0%, sedangkan sisanya sebesar 60,0% (100% - 40,0%) diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis. Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,400 yang artinya 40,0% pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian ini dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti likuiditas, struktur modal, ukuran perusahaan dan lain-lain.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa $t_{hitung} (4,165) > t_{tabel} (2,019)$ dan signifikan $0,040 < 0,05$. Artinya secara parsial konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. di dalam perpajakan prinsip konservatisme dapat terlihat pada beberapa kebijakan pemerintah seperti tidak diperkenalkannya membentuk cadangan piutang ragu-ragu kecuali untuk bank dan *leasing* dengan hak opsi serta perusahaan asuransi dan cadangan biaya reklame untuk usaha pertambangan dan hanya menggunakan metode harga perolehan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO) tidak boleh menggunakan (LIFO) untuk menilai persediaan dan pemakaian untuk perhitungan harga pokok. Prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan di dalam perpajakan. Prinsip konservatisme akuntansi digunakan bukan sebagai alasan untuk mengurangi besar pajak yang dibayarkan wajib pajak atau

perusahaan akan tetapi prinsip konservatisme merupakan tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan yang mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba.

4.2.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa $t_{hitung} (5,187) > t_{tabel} (2,019)$ dan signifikan $0,033 < 0,05$. Artinya secara parsial dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adanya komisaris independen akan membuat manajemen berhati-hati dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kebijakan perusahaan. Komisaris independen akan mengawasi kinerja dewan komisaris maupun direksi dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan. Pengawasan yang semakin ketat dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif. Hal ini berarti adanya komisaris independen efektif dalam mencegah tindakan *tax avoidance*.

4.2.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa $t_{hitung} (6,223) > t_{tabel} (2,019)$ dan signifikan $0,028 < 0,05$. Artinya secara parsial komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor

Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan teori agensi, semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melelakukan *tax avoidance* dapat diminimalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit yang melakukan tugasnya dengan baik akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan selalu mengawasi segala kegiatan di dalam perusahaan, sehingga akan meminimalisir tindakan *tax avoidance*. Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

4.2.4 Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa F_{hitung} adalah $5,559 > F_{tabel}$ 2,83, dengan signifikansi $0,045 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu konservatisme akuntansi, dewan komisaris independen dan komite audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan di dalam perpajakan. Prinsip konservatisme akuntansi digunakan bukan sebagai alasan untuk mengurangi besar pajak yang dibayarkan wajib pajak atau perusahaan akan tetapi prinsip konservatisme merupakan tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan yang

mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba. kehadiran komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut mengasumsikan bahwa komisaris independen memiliki efek yang berarti terhadap penghindaran pajak. Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dimana dengan semakin banyaknya jumlah komisaris independen maka pengawasan dari manajemen akan semakin ketat, sehingga penghindaran pajak dapat ditekan. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan *tax avoidance* dapat diminimalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit yang melakukan tugasnya dengan baik akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan selalu mengawasi segala kegiatan di dalam perusahaan, sehingga akan meminimalisir tindakan *tax avoidance*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Konservatisme akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana $t_{hitung} (4,165) > t_{tabel} (2,019)$ dan signifikan $0,040 < 0,05$.
2. Dewan komisaris independen akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana $t_{hitung} (5,187) > t_{tabel} (2,019)$ dan signifikan $0,033 < 0,05$.
3. Komite Audit akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana $t_{hitung} (6,223) > t_{tabel} (2,019)$ dan signifikan $0,028 < 0,05$.
4. Konservatisme akuntansi, dewan komisaris independen dan komite audit secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana $F_{hitung} 5,559 > F_{tabel} 2,83$, dan signifikan $0,045 < 0,05$.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat membantu perusahaan tidak hanya di Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia namun juga perusahaan lain yang terdaftar di BEI untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan Tax Avoidance agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
2. Sebaiknya penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk memperbesar sampel dengan mengambil periode waktu lebih panjang. Kemungkinan perbedaan periode pengamatan ini diperkirakan akan memberikan hasil berbeda. Oleh karena itu, di masa yang akan datang disarankan untuk menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, I Made Agus Riko. (2017). *Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance*.
- Baridwan, Zaki, (2015). *Intermediate Accounting*, Edisi Delapan, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Ugm, Yogyakarta.
- Brealey, Richard A., Myers Dan Marcus, (2015), *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, Edisi Kelima, Jilid 2, Alih Bahasa Bob Sabran, Erlangga, Jakarta.
- Brigham, Eugene Dan Joel F Houston, (2015). *Manajemen Keuangan Ii*. Jakarta:Salemba Empat.
- Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Melalui Metode Practice Rehearsal Pairs Pada Siswa Sma Al-Hidayah Medan. *Biormatika: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 6(1), 74-78.
- Damayanti, Fitri. (2015). *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance*.
- Darmadji, Tjiptono Dan Hendy M. Fakhruddin, (2016). *Pasar Modal Di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Eksandy, Arry. (2017). *Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)*.
- Finansial, Idn. (2021). "Mencari Data Perusahaan Yang Sudah Ipo", <https://www.idnfinancials.com>-, Diakses Pada 10 April 2021 Pukul 20:00.
- Fahmi, Irham. (2018). *Pengantar Manajemen Keuangan. Teori Dan Soal Jawab*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Ghozali, Imam, (2015). *Analisis Multivariat Dengan Program Spss*, Edisi Ketiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Husnan, Suad. (2014). *Dasar-Dasar Teori Portofolio Dan Analisis Securitas*. Yogyakarta: Upp Amp Ykpn.

- Indonesia, Bursa Saham. (2021). “*Mencari Data Perusahaan Yang Sudah Ipo*”, Www.Idx.Com-, Diakses Pada 10 April 2021 Pukul 19:00.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). Unpab Lecturer Assessment And Performance Model Based On Indonesia Science And Technology Index. In Journal Of Physics: Conference Series (Vol. 1175, No. 1, P. 012268). Iop Publishing.
- Jogiyanto, (2016). *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*, Bpfe, Yogyakarta.
- Martono Dan D. Agus Harjito, (2015). *Manajemen Keuangan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Ekonisia, Fakultas Ekonomi Uii, Yogyakarta.
- Milanie, F., Sari, A. K., & Saputra, H. (2020). An Effect Of Empowerment Organizational Structure And Job Design Employee Effectiveness Work In The Office Directors Of Ptpn Ii Tanjung Morawa. International Journal Of Management, 11(5).
- Ok, Saham. (2021). ”*Mencari Data Perusahaan Yang Sudah Ipo*“,Http://Www.Sahamok.Com-, Diakses Pada 10 April 2021 Pukul 21:00
- Pramudito, Batara Wiryo. (2015). *Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance*.
- Riyanto, Bambang, (2015). *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*, Bpfe, Yogyakarta.
- Santo, Vibby. (2017). *Jual Saham Anda Lebih Mahal*, Vibby Publishing, Jakarta.
- Sartono, Agus. (2015). *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi.Edisi Ke Empat*. Bpfe, Yogyakarta.
- Siregar, O. K. (2015). Penerapan Model Location Quotient Dan Scalogram Dalam Mendorong Pusat Pertumbuhan Baru Di Wilayah Perbatasan Kota Medan. In Seminar Nasional Ekonomi Manajemendan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Sudana, I Made. (2015). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Bisnis*, Cv Alfabeta, Bandung.
- Susanti, Camelia Mayang. (2018). *Pengaruh Konservatisme, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*.
- Tandelin, Eduardus. (2015). *Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio*, Badan Penerbit Universitas Gajah Mada. Yogyakarta: Bpfe.